

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 KECAMATAN BUMI MAKMUR



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT BUMI MAKMUR
NOMOR : 900.1.11/ 12 /SEKRT/2025**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH
(RENJA AKHIR-PD)
KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026**

CAMAT BUMI MAKMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Akhir Pemerintah Daerah.
- b. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Akhir Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 s/d 2026, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) dan menetapkan Rencana Kerja Akhir dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rencana Kerja Akhir Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Akhir Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rencana Kerja Akhir Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;
- KEDUA** : Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut;
- KETIGA** : Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan

menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

KEEMPAT : Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah;

KELIMA : Sistematika Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Perangkat Daerah memuat:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumi Makmur

Pada tanggal 16 Juli 2025



**Camat Bumi Makmur
Kabupaten Tanah Laut,**

H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP. 19770911 200501 1 006

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat hidayah dan karunianya sehingga Dokumen Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026 Kabupaten Tanah Laut dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026 ini dibuat dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2026 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun 2026 yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Akhir Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dimana RKA-SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan di formulasikan ke dalam RAPBD TA 2026.

Dokumen Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026 adalah dokumen yang berisikan program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan target capaian tahun 2024.

Semoga Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026 ini dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi untuk peningkatan kinerja bagi aparatur pemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sebelum ditetapkan RKPD Tahun 2026 ini, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja Akhir ini.

Bumi Makmur, 28 Juli 2025

**Camat Bumi Makmur
Kabupaten Tanah Laut,**



Halimam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP. 19770911 200501 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur	32
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III	48
TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR	48
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD	

Tahun 2026 Kecamatan Bumi Makmur.....	48
3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	52
BAB IV	69
RENCANA KERJA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	69
BAB V	70
PENUTUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Tahun 2024.....	18
Tabel TC.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut.....	19
Tabel 2. 1	Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024.....	29
Tabel TC.30	Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024.....	31
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awai RKPD tahun 2026 Kecamatan Bumi Mamur.....	37
Tabel TC.32	Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Bumi Makmur.....	47
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026..	51
Tabel 4. 1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026.....	52
Tabel TC.33	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Grafik Data Pelayanan Tahun 2024.....	30
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Akhir Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD guna mengoperasionalkan RKPD disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan

program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah sebelum dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut.

SKPD Kecamatan Bumi Makmur berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan diamanatkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Akhir SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 - h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Akhir Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Akhir Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
- s. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Akhir Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
- x. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Akhir (Renja-Akhir) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam mengoperasionalkan RKPD SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026, yaitu :

- a. Sebagai acuan SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam mengoperasionalkan RKPD SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut.
- b. Merumuskan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bumi Makmur selama Tahun 2026 sebelum ditetapkan melalui proses pembahasan oleh Tim RKPD Kabupaten Tanah Laut.
- c. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan sasaran setiap program dan kegiatan.
- d. Untuk mengetahui berapa anggaran/pagu yang diperlukan dalam membiayai setiap program dan kegiatan sebagai bahan untuk menyusun APBD Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang ditulis adalah menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026 , yang terdiri dari:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur
	2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur
BAB IV	RENCANA KERJA AKHIR DAN PENDANAAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR
	4.1. Program dan Kegiatan
BAB V	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun
Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur**

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bumi Makmur berjalan sebagaimana yang diharapkan, artinya tepat sasaran. Ini dapat dibuktikan dengan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam pekerjaan yang telah menghasilkan beberapa produk dokumen perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi misalnya ketidakjelasan regulasi atau peraturan lainnya yang tidak relevan dengan kondisi pada saat ini

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

1. Masalah – masalah yang dihadapi;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026 Juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2026;
2. Memperhatikan keberlanjutan pembangunan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja Tahun Anggaran 2024

Kecamatan Bumi Makmur Telah melaksanakan 4 (Empat) Program yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 5.329.365.974 ,- dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar **96,22%** dan serapan anggaran mencapai **86,49 %**. Adapun program yang berkaitan dengan renstra telah mencapai hasil yang tidak maksimal yaitu:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan capaian serapan anggaran sebesar 78,83% dan capaian Fisik Sebesar 83,33%
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan capaian serapan anggaran sebesar 78,35% dan capaian Fisik Sebesar 66,67%

Adapun hasil evaluasi Rancangan Awal Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun 2024 telah dilaksanakan dengan capaian realisasi keuangan sebesar **86,49%** dan realisasi fisik **96,22%**. Berikut ini adalah hasil evaluasi Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 dan capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai

target yang telah ditetapkan yaitu Terlaksananya Belanja Pegawai berupa gaji pokok dan tambahan penghasilan, dengan pagu anggaran Rp. 3.107.557.763,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.781.583.834,- dengan tingkat capaian target 89,51 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian, Sub Kegiatan

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan pagu anggaran Rp. 22.005.750,- dan realisasinya sebesar Rp. 16.110.000,- dengan tingkat capaian target 73,21 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 2.957.072,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.915.686,- dengan tingkat capaian target 98,60%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai

target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 136.368.874,- dan realisasinya sebesar Rp. 128.909.624,- dengan tingkat capaian target 94,53 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran Rp. 3.972.195,- dan realisasinya sebesar Rp 3.367.000,- dengan tingkat capaian target 84,76%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan pagu anggaran Rp. 7.998.452,- dan realisasinya sebesar Rp. 5.363.000,- dengan tingkat capaian target 67,05 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

5) Penyediaan Bahan/Material

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Bahan/Material, dengan pagu anggaran Rp. 21.838.659,- dan realisasinya sebesar Rp. 21.095.000,- dengan tingkat capaian

target 96,59 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 281.500.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 279.412.192,- dengan tingkat capaian target 99,26 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran Rp. 111.450.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 35.601.617,- dengan tingkat capaian target 31,94%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 181.144.236,- dan realisasinya sebesar Rp. 141.375.629,- dengan tingkat capaian target 78,05%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan

yang dilaksanakan.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,- dan realisasinya sebesar

Rp. 29.962.800,- dengan tingkat capaian target 99,88%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran Rp. 63.000.000,- dan realisasinya sebesar

Rp. 61.450.724,- dengan tingkat capaian target 97,54%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan, dengan pagu anggaran Rp. 4.997.672,- dan realisasinya sebesar Rp. 4.651.200,- dengan tingkat capaian target 93,07%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan pagu anggaran Rp. 54.899.245,- dan realisasinya sebesar Rp. 52.987.820,- dengan tingkat capaian target 96,52%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pagu anggaran Rp. 99.387.817,- dan realisasinya sebesar Rp. 93.741.950,- dengan tingkat capaian target 94,32%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

- 2) Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, dengan pagu anggaran Rp. 1.119.595.094,- dan realisasinya sebesar Rp. 882.580.000,- dengan tingkat capaian target 78,83%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 83,33% dari

seluruh kegiatan yang dilaksanakan

- 3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan pagu anggaran Rp. 44.908.629,- dan realisasinya sebesar Rp. 35.185.000,- dengan tingkat capaian target 78,35%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 66,67% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan pagu anggaran Rp. 9.840.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 9.840.000,- dengan tingkat capaian target 100%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

- 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan pagu anggaran Rp. 14.985.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 13.320.000,- dengan tingkat capaian target

88,89%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

3) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, dengan pagu anggaran Rp. 10.959.516,- dan realisasinya sebesar Rp. 10.125.000,- dengan tingkat capaian target 92,39%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

Tabel 2. 2 Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/Program		Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Keterangan Tidak Tercapai
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (Persen)	Nilai	0,36	0,36	100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,00	92,13	102%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa Mandiri (Persen)	Nilai	0,36	0,36	100%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Mandiri (Persen)	Nilai	0,36	0,36	100%	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri (Persen)	Nilai	0,36	0,36	100%	
	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur	Nilai	75	72,10	96%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persentase	90	90,88	101%	

Tabel TC.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan Tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2026(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%)	100,00	28.778.242.400	100,00	-	100	3.592.148.357	669.200.920	-	-	-	-	-	669.200.920	0,00%	18,63%	669.200.920	2,33%					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	55.812.000	0,00	-	100	5.999.341	50	-	-	-	-	-	50	-	50,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	7,00	37.208.000	0,00	-	7	3.999.735	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	18.604.000	0,00	-	4	1.999.606	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		22.324.800.00 0	0,00	-	100	3.068.691.72 1	100	600.369.33 1	-	-	-	100	600.369.33 1	100,00 %	19,56%	0,00	600.369.33 1	0,00%	2,69 %
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24,00	22.324.800.00 0	0,00	-	22	3.068.691.72 1	18	600.369.33 1	-	-	-	18	600.369.33 1	81,82%	19,56%	18,00	600.369.33 1	75,00%	2,69 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,0 0	186.040.000	0,00	-	100	22.089.000	100	-	-	-	-	100	-	100,00 %	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00 %
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	23,00	186.040.000	0,00	-	23	22.089.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		3.891.956.800	0,00	-	100	146.258.500	-	21.071.930	-	-	-	-	21.071.930	0,00%	14,41%	0,00	21.071.930	0,00%	0,94 %
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	37.208.000	0,00	-	1	4.986.460	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00 %
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8,00	1.302.280.000	0,00	-	5	47.426.181	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00 %

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2,00	37.208.000	0,00	-	1	4.991.018	-	-									0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2,00	59.532.800	0,00	-	2	7.997.162	-	-									0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3,00	223.248.000	0,00	-	1	14.957.679	-	-									0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400,00	2.232.480.000	0,00	-	12	65.900.000	3	21.071.930									25,00%	31,98%	3,00	21.071.930	0,75%	0,94%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*) (%)		223.248.000	0,00	-	100	29.220.495	-	-									0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5,00	223.248.000	0,00	-	7	29.220.495	-	-									0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		1.352.225.600	0,00	-	100	214.289.300	-	32.992.659									0,00%	15,40%	0,00	32.992.659	0,00%	4,46%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	489.000.000	0,00	-	12	84.500.000	3	7.228.085						3	7.228.085	25,00%	8,55%	3,00	7.228.085	25,00%	1,48%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	863.225.600	0,00	-	12	129.789.300	2	25.764.574						2	25.764.574	16,67%	19,85%	2,00	25.764.574	16,67%	2,98%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		744.160.000	0,00	-	100	105.600.000	-	14.767.000						-	14.767.000	0,00%	13,98%	0,00	14.767.000	0,00%	4,07%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	297.664.000	0,00	-	1	37.500.000	1	6.850.000						1	6.850.000	100,00%	18,27%	1,00	6.850.000	100,00%	2,30%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13,00	446.496.000	0,00	-	12	53.000.000	12	7.917.000						12	7.917.000	100,00%	14,94%	12,00	7.917.000	92,31%	1,77%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0,00	-	23	15.100.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		74,06%	18,63%		
																		Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah		
	KECAMATAN																						

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan (NILAI)	92,00	148.832.000	90,00	-	90	5.939.989	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Persen)			0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
			Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen)		148.832.000	0,00	-	1	5.939.989	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00	-	0,00%	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1,00	148.832.000	0,00	-	1	5.939.989	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%		
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri (Persen)	72,00	520.912.000	36,00	-	36	51.772.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen)		520.912.000	0,00	-	1	51.772.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%

		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	11,00	74.416.000	0,00	-	11	9.990.000	-	-							0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)			0,00		3		-								0,00%		0,00		0,00%	
					446.496.000		-		41.782.000									0,00%			-		0,00%
			*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3,00		0,00		3		-								0,00%		0,00		0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%		
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Mandiri (Persen)	72,00	8.016.240.000	36,00	-	36	941.328.057	24.550.000	-	-	-	-	24.550.000	0,00%	2,61%			24.550.000		0,31%	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen)	100,00	8.016.240.000	0,00	-	100	941.328.057	24.550.000	-	-	-	-	24.550.000	0,00%	2,61%	0,00		24.550.000	0,00%	0,36%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 masih bersifat umum belum ada standar baku mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mengingat tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan SKPD Kecamatan Bumi Makmur tidak lepas dari Program/Kegiatan yang mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Laut.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bumi Makmur yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tanah Laut serta rencana strategis SKPD Kecamatan Bumi Makmur, maka dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lingkup SKPD yang ada di wilayah Kecamatan Bumi Makmur dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Bumi Makmur.

Kecamatan Bumi Makmur dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan. Adapun jenis produk dan layanan yang ada pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur dan telah dilaksanakan selama ini antara lain:

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bumi Makmur,

salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Bumi Makmur pada Tahun 2024 memperoleh IKM sebesar **92,13** dengan mutu pelayanan berkategori **Sangat Baik**.

Adapun jenis pelayanan pada kantor kecamatan Bumi Makmur yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga
2. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP
3. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA
4. Pelayanan fasilitasi pengajuan Surat Keterangan Pindah
5. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran
6. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian
7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa
9. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
11. Pelayanan Pengajuan Subsidi Listrik PLN
12. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha
13. Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)
14. Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)

B. Pelayanan Perizinan

1. Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah
2. Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Kecamatan Bumi Makmur telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di kantor Kecamatan Bumi Makmur. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 14 jenis pelayanan non perizinan dan 2 pelayanan perizinan telah memenuhi target indikator tahun 2024 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi, pelayanan administrasi kependudukan dan legalisasi surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 3 Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga	618	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP	408	Seksi Pelayanan
3	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA	222	Seksi Pelayanan
4	Pelayanan fasilitasi pangajuan Surat Keterangan Pindah	8	Seksi Pelayanan
5	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran	246	Seksi Pelayanan
6	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian	65	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	116	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa	0	Seksi Pelayanan
9	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan	31	Seksi Pelayanan

	Ahli Waris		
10	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	6	Seksi Trantib
11	Pengajuan Subsidi Listrik PLN	-	Seksi Kemasyarakatan
12	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha	38	Seksi Pelayanan
13	Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)	47	Seksi Kemasyarakatan
14	Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)	45	Seksi Pelayanan
15	Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah	26	Seksi Kemasyarakatan



Gambar 2. 1 Grafik Data Pelayanan Tahun 2024

Berdasarkan pada Tabel dan Gambar diatas, Pelayanan Kepengurusan Kartu Keluarga mempunyai capaian paling banyak yaitu 618 berkas, Pengajuan Subsidi Listrik PLN tidak ada sama sekali.

Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan, berupa 493 lembar kuesioner yang telah diisi oleh masyarakat, sehingga didapat nilai untuk IKM Tahun 2024 adalah **92.13** dan termasuk kategori Sangat Baik serta berada dalam mutu pelayanan **A**. Dan untuk sejak tahun 2017 hingga tahun 2024, Kecamatan Bumi Makmur sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dengan didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Seksi dan Sub Bagian yang ada di SKPD Kecamatan Bumi Makmur.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja yang digunakan adalah data kinerja tahun 2024, berapa capaian yang telah terealisasi sehingga untuk tahun yang akan datang dapat diprediksi target dan capaiannya.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Kecamatan Bumi Makmur
Kabupaten Tanah Laut

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Oaerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catalan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n- 1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			90.00	92.15	92.30	92.50	92.13	-	93.00	93.50	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur

Sejauh ini, tingkat kinerja pelayanan di SKPD Kecamatan Bumi Makmur cukup berjalan dengan lancar, mengingat kuantitas PNS di Kecamatan Bumi Makmur yang cukup memadai terdiri atas 19 (Sembilan Belas) orang ASN dan 3 (Tiga) orang pegawai tenaga kontrak. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap kualitas kerja ASN yang lain yang secara individu sudah memegang jabatan dan pekerjaannya sesuai tupoksi masing-masing.

Daripada itu kecamatan bumi makmur juga masih membutuhkan tenaga ASN khusus untuk bidang analisis dan pengelola pada masing-masing bidang, sarana dan prasarana yang dimiliki walaupun sejauh ini sudah cukup optimal akan tetapi kondisi usia dan fisik sarana dan prasarana tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. Harapannya pada Tahun 2026, sarana dan prasarana yang sudah tidak layak tersebut dapat diperbarui ataupun ditambah agar semakin meningkatkan kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur kepada masyarakat.

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat dan tentunya berdasarkan prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Harapannya dengan adanya pelayan publik berupa pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, menciptakan

kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

2. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur karena keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka aparatur yang ada harus mencukupi/ideal dalam jumlah dan memiliki persyaratan kuantitas. Oleh karena itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan kompetensi sumber daya aparatur dan penambahan aparatur.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan harapan agar peran serta masyarakat untuk terlibat dalam setiap pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa tantangan yang dijumpai antara lain:

1. Pelayanan Publik
 - a. Tuntutan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas;
 - b. Sikap mental dan budaya kerja aparat kecamatan sebagai pelayanan publik yang dituntut senantiasa maksimal dan optimal;
 - c. Penyelenggara Pemerintahan Desa yang semakin dinamis berkaitan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah desa;
 - d. Era globalisasi dan Kemajuan teknologi informasi menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat harus mengikuti perubahan;

- e. Masih kurangnya kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik.
- 2. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.
 - a. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Letak Geografis dan Kondisi wilayah yang rentan terjadi bencana tahunan seperti Banjir, Kebakaran Lahan dan Angin Puting Beliung
- 3. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- 1) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - 2) Belum optimalnya Penyusunan APBDDES;
 - 3) Belum optimalnya Desa yang administrasi pengelolaan keuangannya yang baik.
 - 4) BUMDes yang belum berjalan secara optimal.
- 4. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- 1) Masih kurangnya jumlah SDM Aparatur di Kecamatan Bumi Makmur;
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor kecamatan Bumi Makmur masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung, ketersediaan Komputer dan peralatan penunjangnya;
- 3) Masih terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan semakin tinggi.

Sementara beberapa peluang yang ada di Kecamatan Bumi Makmur antara lain adalah :

- 1. Adanya dukungan mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat;

2. Adanya peningkatan kemampuan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik;
3. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Adanya dukungan dari instansi terkait.

Merujuk pada hasil identifikasi tantangan dan peluang yang ada, maka beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Bumi Makmur guna mencapai sasaran yang telah ditentukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dasar hukum pelaksanaan pelayanan publik kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seksi pelayanan yaitu Peraturan Bupati Tanah Laut No. xx Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan;
2. Pembuatan inovasi pelayanan yang sudah memiliki dasar hukum Surat Keputusan Bupati Tanah Laut, yaitu :
 - 1) Inovasi TERBAIK (Transparan, Efektif & Efisien, Ramah, Bebas Biaya, Amanah, Ikhlas, Kompeten) : SK Bupati Tanah Laut No.188.45/1297-KUM/2021;
 - 2) Inovasi SI CANTIK (Sistem Informasi Cepat Terlayani, Aman, Nyaman, Tertib, Inovatif dan Konsisten) : SK Bupati Tanah Laut No.188.45/1352-KUM/2023.
3. Adanya Kerjasama antara aparat desa dengan seksi pelayanan Kantor Kecamatan Bumi Makmur dalam pelaksanaan Inovasi Pelayanan;
4. Adanya Pelaporan terkait data-data pelayanan oleh aparat desa yang dilaporkan ke seksi pelayanan pada setiap bulannya;
5. Terdapat rapat-rapat koordinasi, monitoring dan analisa terkait pelayanan publik;
6. Terdapat tambahan SDM dalam pelaksanaan pelayanan publik kecamatan;

7. Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat;
8. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan program - program yang masih belum optimal bersama instansi terkait;
9. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awai RKPD tahun 2026
Kecamatan Bumi Mamur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut	IKM Sekretariat Kecamatan Bumi Makmur	100%	Rp4.072.997.600,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	73,00 100%	Rp3.775.369.803,50	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Persen)	100%	Rp7.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp6.480.681,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun(Dokumen)	7 Dokumen	Rp5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun(Dokumen)	7 Dokumen	Rp3.999.478,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	Rp2.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	Rp2.481.203,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100%	Rp3.000.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp3.113.678.138,00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22 Orang/bulan	Rp3.000.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22 Orang/bulan	Rp3.113.678.138,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100%	Rp23.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	22 Paket	Rp23.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	Rp523.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp311.128.229,50
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	Rp4.982.462,55
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8 Paket	175.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8 Paket	Rp76.423.633,20
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2 Paket	Rp4.994.583,75
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 Paket	8.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 Paket	Rp7.997.550,00

	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2 Paket	Rp16.980.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	360 Laporan	300.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	360 Laporan	Rp199.750.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu* (%)	100%	Rp138.997.600,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp96.592.755,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	68.997.600,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp27.750.000,00
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	40.000.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Rp39.380.025,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5 Unit	30.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5 Unit	Rp29.462.730,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	Rp264.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp130.900.000,00

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	134.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	Rp130.900.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5 Laporan	130.000.000,00						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	Rp116.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp116.590.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	1 Unit	40.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit	Rp38.990.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13 Unit	60.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13 Unit	Rp61.800.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12 Unit	16.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12 Unit	Rp15.800.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		IKM Kecamatan Bumi Makmur	92 Nilai	Rp20.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	92,30 Nilai	Rp9.999.786,00	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Persen)	100%	Rp20.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP	100%	Rp9.999.786,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Laporan	20.000.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		Rp9.999.786,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		IKM Kecamatan Bumi Makmur	92 Nilai	Rp70.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Mandiri (Persen)	45,45 Persen	Rp67.906.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen)	100%	Rp70.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktuinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen)	100 Persen 100 Persen	Rp67.906.000,00	

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	10 Dokumen	10.000.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)		Rp7.975.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3 Laporan	60.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		Rp59.931.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		IKM Kecamatan Bumi Makmur	92 Nilai	Rp30.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Desa Mandiri	45,45 Persen	Rp29.910.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp30.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	2 Gangguan	Rp29.910.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	30.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Rp29.910.000,00	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		IKM Kecamatan Bumi Makmur	92 Nilai	Rp1.150.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Desa Mandiri (Persen)	45,45 Persen	Rp1.094.562.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen)	100%	Rp1.150.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani Persentase PPKS yang Terfasilitasi	2 Gangguan 100 Persen	Rp1.094.562.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	15 Orang	100.000.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)		Rp99.990.000,00	

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang)	2000 Orang	1.000.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang)		Rp949.913.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	8 Dokumen	50.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		Rp44.659.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		IKM Kecamatan Bumi Makmur	92 Nilai	Rp70.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Mandiri (Persen)	45,45 Persen	Rp44.659.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	100 Persen	Rp70.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Penerima Manfaat Pembedayaan Masyarakat Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp49.865.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Rp20.000.000,00	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	11 Dokumen	20.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)		Rp14.970.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2 Dokumen	20.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)		Rp14.895.000,00	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 – 2030, yang berisi perencanaan program/kegiatan selama 5 (Lima) tahun, direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan perlu proses, dan dilakukan dengan meminta masukan dari Camat, Sekretaris Camat, para Kepala Seksi, para Kasubbag dan staf dengan mengedepankan keperluan dan skala prioritas, baik keperluan administrasi kantor, aparat kecamatan, aparat desa maupun kebutuhan masyarakat yang mendesak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Rencana Kerja Akhir pada Tahun 2026 terdapat kegiatan yang menitik beratkan pada kegiatan Pelayanan, Kemasyarakatan, Keamanan, Keagamaan, Bantuan Sosial dan Kesekretariatan. Secara umum, hasil analisis kebutuhan pelaksanaan tupoksi SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026 sudah sesuai dengan Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 – 2030, namun ada beberapa Program dan Kegiatan yang dimuat dalam rumusan Rencana Kerja Akhir 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan ada juga beberapa kegiatan yang dibuat dalam Rencana Akhir Renja 2026 tetapi nilai pagunya dinaikan dari nilai rancangan awal RKPD dikarenakan melihat kondisi persentase yang dicapai pada tahun sebelumnya telah berjalan dengan baik.

Tabel TC.32 Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Bumi Makmur

No	Program/Kegiatan/sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
NIHIL							

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur terkait langsung dengan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Disamping itu hasil- hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD Tahun 2026 Kecamatan Bumi Makmur

Tujuan merupakan perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada operasional visi dan misi. Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut maka tujuan yang ditetapkan harus selaras dan mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah terpilih Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Adapun visi Kepala Daerah

Terpilih tahun 2025-2029 adalah “**BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN**”. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Dalam Pilkada yang telah berlangsung, Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan 6 Misi untuk mewujudkan Visi Pembangunan, Misi Kepala Daerah Terpilih tahun 2025-2029 antara lain :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan ;
2. Mewujudkan Peningkatan Kesehatan yang Berkualitas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keagamaan serta Kualitas SDM;
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
5. Penataan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan;
6. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas.

Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM Yang Unggul Dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif Dan Dinamis
4. Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-

2029 maka Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut akan Misi Pembangunan Daerah ke-3 “**Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif Dan Dinamis**” dengan Tujuan “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**”

Rumusan dari tujuan di atas menerjemahkan pelayanan publik yang berorientasi untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintahan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi yang optimal. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran pertama, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, sasaran ini utamanya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui keterbukaan informasi serta pengelolaan anggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas dengan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk administrasi, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Partisipasi masyarakat juga diperkuat melalui keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan guna memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan publik. Di sisi lain, penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan dan sistem penilaian berbasis kinerja agar pelayanan yang diberikan lebih profesional dan responsif. Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, seperti e-government dan sistem informasi manajemen, turut berperan dalam meningkatkan efisiensi administrasi serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada layanan dapat

terwujud demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesenimbangan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sesuai dengan tujuan Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut maka sasaran yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah ***“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik”***.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	KETERANGAN
			2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	4,45	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	92,30	
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	45,45	

3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rencana Kerja Akhir Tahun 2026 SKPD Kecamatan Bumi Makmur terdapat 6 (Enam) Program dan 11 (Sebelas) kegiatan serta 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan yang telah direncanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan terfokus di Kecamatan Bumi Makmur dengan menitik beratkan kepada masyarakat sebagai objek utama.

Adapun rencana program dan kegiatan untuk Tahun 2026 yang nantinya akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Bumi Makmur untuk lebih jelasnya seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

No	PROGRAM / KEGIATAN	
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	a	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	B	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	b	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
	c	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	b	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

		b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		e	Penyediaan Bahan/Material
		f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		b	Pengadaan Mebel
		c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel TC.33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR						Rp5.027.612.589,50								Rp5.499.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						Rp5.027.612.589,50								Rp5.499.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						Rp5.027.612.589,50								Rp5.499.000.000,00	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	-			73.00 Nilai 100 Persen	Rp3.775.369.803,50						-		Rp3.969.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	Rp6.480.681,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	-		Rp9.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	Rp3.999.478,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk peru mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	Rp2.481.203,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk peru mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	Rp3.113.678.138,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk peru mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	-	Rp3.100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	Rp3.113.678.138,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk perlu mubahan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp3.100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	Rp311.128.229,50				Membangun dari desa dan dari bawah untuk perlu mubahan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	-	Rp456.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp4.982.462,55	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk peru mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	Rp76.423.633,20	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk peru mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp90.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	Rp4.994.583,75	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk peru mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																

			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Rp7.997.550,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk perlu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp9.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material															
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	Rp16.980.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk perlu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				360 Laporan	Rp199.750.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk perlu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp310.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	Rp96.592.755,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk perluasan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	-	Rp127.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	Rp27.750.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk perluasan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp37.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	Rp39.380.025,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk perluasan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp50.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	Rp29.462.730,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk perlu mubahan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	-		100 Persen	Rp130.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk perlu mubahan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	-	Rp140.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	Rp130.900.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk perlu mubahan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp140.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	Rp116.590.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	-	Rp137.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	Rp38.990.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp50.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	Rp61.800.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp70.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	Rp15.800.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		Rp17.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-		92,30 Nilai	Rp9.999.786,00						-	Rp30.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP	-		100 Persen	Rp9.999.786,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut	-	Rp30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	Rp9.999.786,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		Rp30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR

3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	-			45,45 Persen	Rp67.906.000,00						-	Rp90.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	-			100 Persen 100 Persen	Rp67.906.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut	-	Rp90.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				11 Dokumen	Rp7.975.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		Rp20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	Rp59.931.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		Rp70.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR

4		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Desa Mandiri di Kecamatan</i>	-			45,45 Persen	Rp29.910.000,00					-	Rp40.000.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani</i>	-			2 Gangguan	Rp29.910.000,00			Membangun dan dari bawah untuk perlu mbutuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut	-	Rp40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	Rp29.910.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dan dari bawah untuk perlu mbutuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		Rp40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Desa Mandiri di Kecamatan</i>	-			45,45 Persen	Rp1.094.562.000,00					-	Rp1.270.000.000,00		

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani Persentase PPKS yang Terasilitasi	-			2 Gangguan 100 Persen	Rp1.094.562.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut	-	Rp1.270.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				15 Orang	Rp99.990.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		Rp110.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2000 Orang	Rp949.913.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		Rp1.100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8 Dokumen	Rp44.659.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		Rp60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	-			45,45 Persen	Rp49.865.000,00						-	Rp100.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu Persentase Desa yang Tertib Administrasi	-			100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp49.865.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut	-	Rp100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	Rp20.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		Rp40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	Rp14.970.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		Rp30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	Rp14.895.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		Rp30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
							J U M L A H	Rp5.027.612.589,50							Rp5.499.000.000,00	

BAB IV

RENCANA KERJA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Kecamatan Bumi Makmur tahun 2025-2029 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang diemban.

Dalam mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan rumusan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026. Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2026 Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik, Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban dan Kesejahteraan Masyarakat ;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Kota, baik mulai dari Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026 selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 nantinya sebelum dilakukan proses penetapan pagu anggaran Tahun 2026 terlebih akan menjalani proses pembahasan anggaran yang akan difasilitasi oleh Bappeda, BPKAD, DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk ditetapkan menjadi KUA/PPAS dan Rencana Kerja Akhir Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang diawali semua dengan melalui review oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal melalui pembinaan dan disiplin kerja seluruh aparatur serta diharapkan memberikan pelayanan uang terbaik secara optimal kepada masyarakat.

Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026 sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur. Rancangan Akhir Renja Perubahan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana Kerja Akhir di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf SKPD Kecamatan Bumi Makmur sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Strategi yang ditempuh untuk ke depannya dalam meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur, antara lain:

1. Melakukan perbaikan dalam bidang perencanaan dan melakukan pengembangan perencanaan untuk masa yang akan datang;
2. Menggali, mengembangkan dan mengendalikan sumber-sumber

informasi yang akan dijadikan bahan/data untuk penyusunan perencanaan SKPD;

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia baik dalam teknis perencanaan untuk mendukung dalam perencanaan anggaran yang efektif agar lebih meningkatkan kinerja SKPD.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2026 ini dibuat agar dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi untuk meningkatkan kinerja bagi seluruh aparatur pemerintah pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bumi Makmur, 28 Juli 2025



KAMAT BUMI MAKMUR,

H. Innam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP. 19770911 200501 1 006